

RESISTENSI DAN NEGOSIASI: MEMPERTAHANKAN OTORITAS PEREMPUAN DI TENGAH PERUBAHAN AGRARIA

Laksmi Adriani Savitri¹

Abstract

Agrarian transformation from subsistent production to commercialization is not merely dealing with technical and commodity transformation. The spirit lays on the transformation of authority holder in social relation, among which is gender relation. Production and consumption decision making on household level, and the decision to change the landscape on community level often marginalize women in case of agricultural commercialization. Commercial production is identical with men's world, while women are loaded with subsistence responsibility. This case illustrates the context of transformation from paddy production into cacao plantation in Sulawesi Tengah (namely Palopu),² which shows how women's authority on production and consumption decision rules. Women's resistance and struggle to negotiate their authority on production and consumption decision on household and community level concretize then as an open opposition enfolded with tradition and household provisions authority.

Keywords: *women, women's authority, agrarian transformation, gender relations, women's resistance*

Pendahuluan

Kegigihan para sarjana feminis, seperti Agarwal, Jewitt, Jackson, Iver-

sen, Razavi untuk terus menyoal perbedaan dan ketidakadilan relasi perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya telah membuahkan banyak

¹ Peneliti di Pusat Kajian Strategis, Universitas Indonesia.

² Semua nama desa dan nama orang dalam tulisan ini adalah *pseudonym*. Lokasi dan nama desa asli dapat diperiksa dalam disertasi penulis di <http://www.bibliothek.uni-kassel.de/public/download/ThesisSavitri.pdf>.

pertanyaan dan temuan seputar hak dan akses perempuan. Perdebatan terutama berkisar pada apakah rumah tangga bersifat sentral terhadap tumbuh atau luruhnya otoritas perempuan dalam pengambilan keputusan sumber daya ataukah otoritas perempuan atas alokasi dan pemanfaatan sumber daya tidak selalu memerlukan keterikatan pada konteks rumah tangga. Artinya, relasi kuasa yang terbangun antara perempuan dan laki-laki di dalam rumah tangga tidak selalu dilihat sebagai faktor penentu derajat otonomi perempuan, karena perempuan sudah tahu dan sadar akan kepentingannya sendiri; tidak perlu 'disadarkan'.

Apabila demikian adanya, berangkat dari pengalamannya di India, Agarwal (1994) menemukan bahwa, dalam konteks rumah tangga, perempuan kerap berstrategi untuk mendapatkan akses terhadap penguasaan aset. Strategi tersebut menunjukkan bahwa perempuan punya agenda dan tujuannya sendiri—yang tidak altruistik atau selalu mengutamakan kepentingan keluarga seperti dikatakan Sen (1990)—dan sering kali dalam rangka bertahan hidup (*survival*), terutama ketika harus menghadapi kondisi-kondisi kritis, misalnya: perceraian, kematian, dan sejenisnya. Berdasarkan pengkajiannya di Afrika Barat,

Jackson (2003) berpendapat bahwa dengan menempatkan rumah tangga sebagai lokus pergulatan kuasa (baca: proses pengambilan keputusan), maka keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan atas sumber daya tergantung pada sejauh mana keterlibatan itu justru akan menjauhkannya dari akses ke sumber daya rumah tangga. Ketidakterlibatan bukan berarti ketiadaan kuasa, melainkan kekuasaan untuk menyiasati atau bahkan menolak keterbatasan.

Pada akhirnya adalah tentang kuasa (*power*), bukan tentang dominasi dan subordinasi yang menceritakan tentang kekuasaan penuh (*powerful*) versus ketiadaan kuasa (*powerless*), melainkan bahwa kekuasaan penuh akan mengundang perlawanan. Perlawanan adalah pernyataan kuasa (Foucault 2002). Dengan membawa masuk soal kuasa ke dalam ruang-hidup sumber daya, kita menemukan mekanisme pasar dan peraturan/program pemerintah menjadi daya penggerak keputusan petani dalam pengelolaan lahan pertaniannya, pemanfaatan hutan dan airnya, dan seterusnya. Ketika pasar memberi harga pada satu komoditas lebih baik dibandingkan komoditas lain atau tidak memberi harga pada sejenis hasil bumi, keputusan petani untuk memilih mana yang ditanam sangat dipenga-

ruhi oleh mana yang dihargai tertinggi. Begitu pula ketika di masa Orde Baru pemerintah meluncurkan berbagai program introduksi komoditas melalui paket-paket penyuluhan, kredit, dan bantuan sarana produksi. Pemberian paket-paket ini dengan sendirinya mempengaruhi petani untuk beralih komoditas.

Perubahan komoditas bukan sekadar mengubah jenis tanaman yang ditanam dan dijual, tetapi membawa serta pula perubahan relasi produksi, termasuk di dalamnya relasi gender. Dalam konteks ini, pembagian kerja berdasarkan gender merupakan bagian tak terpisahkan dari relasi produksi. Di mana letak ruang keputusan untuk memilih jenis komoditas, mengubah hutan menjadi kebun, mengubah sawah menjadi tegakan pohon kakao? Di rumah-rumah keluarga petani dalam perbincangan antara suami dan isteri, atau bisa juga tanpa dibicarakan di antara anggota keluarga. Bagaimana jika jenis tanaman berkait erat dengan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki? Apakah perubahan komoditas bisa membawa perubahan posisi kuasa perempuan dalam keputusan alokasi sumber daya rumah tangga? Apa implikasinya terhadap otoritas dan otonomi perempuan? Apa yang dilakukan oleh perempuan dalam menghadapi peru-

bahan ini, dan mengapa?

Dengan sejumlah teori dan selaksa pertanyaan, saya datang ke sebuah desa di Sulawesi Tengah. Sebut saja Desa Palopu. Ibu Mawar, Ibu Manta, dan Ibu Mini menjadi tempat saya belajar bahwa kehidupan rumah tangga petani adalah proses negosiasi produksi dan konsumsi tanpa akhir, baik negosiasi yang dibahasakan lisan maupun negosiasi dengan bahasa tindakan. Bahkan sulit untuk segera menemukan pola keseragaman dan keunikan dari proses yang berjalan dari satu rumah ke rumah lain, karena cara ketiga ibu ini menegosiasikan agenda-agendanya di keluarga dan komunitasnya masing-masing, termasuk mengekspresikan resistensi, sangat bergantung pada bagaimana posisi mereka didefinisikan di dalam dan di luar keluarganya, baik oleh mereka sendiri, suaminya, maupun oleh komunitasnya.

Dari Sawah ke Kebun Kakao

Desa Palopu terletak di sebuah dataran tinggi yang berbatasan dengan Taman Nasional Lore Lindu dan berjarak hanya sekitar 75 km saja dari Palu, ibu kota Sulawesi Tengah. Karena kondisi geografisnya yang berbukit-bukit dan sudah kehilangan banyak tutupan hu-

tan, sering terjadi longsor yang memutus jalan ke wilayah ini, sehingga perjalanan dari Palu ke Palopu memakan waktu sekitar 2 jam dengan kendaraan roda dua.

Sekitar pertengahan 1990-an, desa ini banyak mengalami perubahan bentang alam. Sebagian kawasan hutan di sekeliling desa, baik yang dihitung masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu maupun di luarnya telah berubah menjadi perkebunan cokelat. Tanaman kakao mulai mendapat perhatian masyarakat ketika sekitar awal 1990-an biji kakao dihargai Rp5.000,00/kg. Memasuki masa-masa krisis ekonomi 1997—1998, petani kakao justru meraup keuntungan dari harga biji kakao yang meroket menjadi Rp15.000,00/kg. Semenjak itu kakao menjadi pilihan komoditas utama bagi kebanyakan petani di Palopu.

Fenomena meledaknya harga kakao tentu saja tidak hanya dialami oleh petani Palopu. Hampir di seluruh tanah Sulawesi, kakao mendapat tempat di lahan-lahan petani. Bahkan di desa tetangga Palopu, yaitu Desa Sunu, 72% lahan sawah telah diubah menjadi perkebunan kakao. Sementara itu orang Palopu, meskipun dapat membeli beras dengan hasil penjualan kakao, tidak tergiur untuk mengu-

bah sawahnya menjadi kebun kakao. Dalam pandangan mereka, memiliki sawah adalah jaminan ketersediaan pangan. Untuk lahan menanam kakao, mereka lebih suka membuka kembali hutan yang dulu pernah dibuka nenek moyangnya untuk kebun. Cara-cara bertani di luar Jawa adalah sejarah panjang pola perladangan berpindah, termasuk di Sulawesi Tengah. Alternatif lain adalah mengubah kebunnya yang ditanami cengkih atau kopi atau tanaman keras lainnya untuk menjadi kebun kakao.

Namun demikian, masuknya kakao sebagai komoditas baru bukan semata berwujud perubahan jenis tanaman di kebun dan pemasukan tambahan di kantong petani; ada relasi-relasi sosial yang ikut berubah. Pertanian Palopu yang selama beberapa abad didominasi oleh pertanian padi, baik padi lahan kering (padi ladang) maupun padi sawah, telah menumbuhkan tradisi kerja sama yang disebut sebagai *palus*. *Mapalus* adalah bekerja berkelompok dan berpindah dari sawah milik satu anggota ke sawah anggota lainnya. Tidak ada kerja dibayar uang, tetapi kerja dibayar kerja. Mereka menyebutnya sebagai *baku balas tanggan*.

Pada tahun 1970-an, harga cengkih dan kopi sangat menggiurkan sehing-

ga memiliki kebun cengkeh menjadi demam di mana-mana. Desa Palopu pun tidak luput dari serangan demam ini. Sayangnya, bukan petani Palopu yang paling banyak menerima keuntungan, karena mereka justru melepaskan banyak lahan untuk orang kota dari Palu yang berambisi memiliki kebun cengkih. Sebagian petani yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai negeri (guru, mantri kesehatan, perawat) dan mampu mempertahankan lahannya juga mulai berkebun cengkih. Petani yang sudah menanam kopi juga tetap mempertahankan lahannya, karena kopi membuat mereka mampu bertahan hidup dengan lebih baik. Apalagi setelah pemerintah daerah Sulawesi Tengah membentuk perusahaan daerah dan membuka perkebunan cengkih di desa tetangga Palopu, petani semakin diyakinkan untuk ikut menanam cengkih. Sementara itu petani yang kurang modal semakin mudah melepas lahannya untuk dibeli orang.

Semenjak cengkih dan kopi melanda perekonomian Desa Palopu, uang menjadi barang yang mudah didapat di desa. Mereka yang memiliki cengkih dan kopi berarti memiliki uang, sementara mereka yang tidak memiliki bisa mendapat uang dari upah menanam, memelihara, dan memanen cengkih atau kopi di kebun milik orang

kota dan petani yang pegawai. Kerja tidak lagi dibayar kerja, tetapi jika ada uang maka pasti ada kerja. *Mapalus* di sawah pun berubah bentuk menjadi kerja kelompok yang diupah per hari Rp10.000,00 sampai Rp15.000,00 per orang.

Setelah harga cengkih merosot dan harga kopi juga mulai naik-turun, di akhir 1980-an dan awal 1990-an kakao di pasaran dunia mulai mendapat harga yang menarik perhatian petani, yaitu mulai dari Rp2.000,00 per kg di akhir 1980-an menjadi Rp5.000,00 per kg pada awal 1990-an, sejalan dengan meningkatnya nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah. Rupiah yang terus anjlok menjadi Rp 15.000,00 per 1 dolar Amerika pada 1997—1998 menyebabkan hampir semua petani di Palopu membatalkan cengkih, kopi, atau vanili di kebunnya untuk digantikan oleh kakao. Namun, di tengah sedemikian dahsyatnya rayuan harga kakao, tidak seperti di Sunu, tidak satu jengkal pun sawah di Palopu berubah bentuk menjadi kebun kakao. Mengapa demikian?

Cerita yang menurut saya paling menarik dari bertahannya sawah terhadap serangan kakao ke Desa Palopu adalah kenyataan bahwa sejarah panjang budidaya padi di sini bukan sekadar soal mempertahankan keterse-

diaan pangan di lumbung masing-masing, tetapi adanya atribusi ketahanan pangan kepada perempuan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan pangan di atas meja. Di Palopu, mulai dari pemilihan benih padi, penyemaian dan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, sampai penanakan menjadi nasi yang terhidang di meja adalah *ibu dapur punya urusan*.

Orang tua-orang tua Palopu menyimpan cerita bahwa di masa lalu perempuan menjadi *to balia*, yaitu pemimpin ritual dalam tiap tahap budidaya padi. Ketika itu sawah belum dikenal dan mereka harus membuka hutan untuk menjadikannya ladang yang bisa ditanami padi. Orang yang punya otoritas untuk menentukan saat-saat paling tepat dalam melakukan berbagai tahap tersebut dan memimpin ritualnya adalah sang *to balia*. Kemudian sebagian besar pekerjaan budi daya padi pun didominasi oleh perempuan. Laki-laki membantu saat membuka hutan untuk ladang. Dan ketika teknik bersawah mulai dikenal, lelaki terspesialisasi untuk mengerjakan pengolahan tanah, pembentukan petak, dan pemagaran bedeng pembibitan. Selebihnya perempuanlah yang bekerja dan menentukan. Mulai dari pemilihan benih dan jenis padi yang akan ditanam, waktu menanam dan mema-

nen, pembentukan kelompok *palus*, melakukan proses pemanenan, proses penyimpanan di lumbung, dan seterusnya.

Ketika perempuan sibuk bekerja di ladang dan sawah, lelaki bertugas menjaga anak. Pada saat damar sudah bisa diambil getahnya, lelaki masuk hutan untuk menampung getah damar atau mengambil rotan. Damar dan rotan ditukar dengan minyak goreng, garam, gula, dan keperluan rumah tangga lainnya. Itu sebabnya tradisi pewarisan harta keluarga mengalokasikan sawah dan ladang untuk anak perempuan, sementara anak lelaki mendapat jatah ternak dan tanaman keras (di masa lalu: damar, sekarang: kebun cokelat atau kopi).

Dengan tradisi pembagian peran perempuan dan laki-laki seperti itu, maka ketika tanaman perkebunan masuk ke Palopu dan uang melekat pada setiap komoditas tersebut, dengan sendirinya tanaman perkebunan menjadi ranah laki-laki. Pertanian Palopu yang subsisten dan feminin berubah menjadi komersial dan maskulin. Budidaya cokelat atau kakao jarang mengikutsertakan perempuan dalam pengambilan keputusan produksi maupun dalam pelaksanaan tahapan pekerjaannya. Mulai dari pemilihan bibit kakao, penanaman, pengenda-

lian gulma dan hama penyakit tanaman, serta pemangkasan, sebagian besar diputuskan dan dikerjakan oleh laki-laki. Baru ketika panen, ibu-ibu membantu membelah buah kakao, mengeluarkan biji, dan menjemurnya. Pada saat menjual, ibu-ibu biasanya turun tangan jika jumlah yang dijual relatif tidak banyak dan hasil penjualannya ditujukan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Apabila penjualan dilakukan dalam jumlah besar, biasanya bapak-bapak yang menangani dan memutuskan dalam memilih pembeli yang memberi harga tertinggi. Jika ditanyakan kepada ibu-ibu kenapa mereka tidak ikut bekerja dan mengurus kebun cokelat, kebanyakan mereka berpendapat bahwa itu urusan laki-laki.

Namun, sebelum terjebak oleh kesan umum, Ibu Mawar menawarkan cerita yang sedikit berbeda. Sebagai anak tertua perempuan, Ibu Mawar diwarisi sebidang tanah ladang oleh ayahnya. Karena suaminya bekerja sebagai ahli bangunan yang harus berpindah-pindah lokasi untuk membangun rumah pesanan orang, baik di dalam maupun di luar desanya, tinggallah Ibu Mawar yang harus memutuskan dan mengerjakan ladang miliknya sendiri. Ibu Mawar memutuskan untuk menanam kakao. Ia mengumpulkan bibit, menanam, dan memelihara sebisanya

sendiri. Ia mempelajari cara membudidayakan kakao dengan memperhatikan petani lain serta bertanya kepada ayahnya atau kepada sesama petani di desanya.

Ketika suami Ibu Mawar pensiun dari bertukang, mulailah ia masuk ke kebun cokelat dan mengerjakan pekerjaan tipikal lelaki petani cokelat: memangkas, menyemprot gulma dengan herbisida, memanen buah. Ibu Mawar pun mengambil tugas feminin dari pekerjaan budidaya kakao, yaitu membelah buah kakao dan menjemur bijinya. Penjualan hasil panen tidak diputuskan sendiri, tetapi didiskusikan dengan suaminya. Demikianlah pengaturannya, meskipun hak milik kebun ada di tangan perempuan, alokasi sumber daya dan keputusan produksi tetap tidak menjadi otoritas perempuan sepenuhnya. Suami Ibu Mawarlah yang memutuskan jenis herbisida apa dengan harga berapa yang bisa mereka pakai, termasuk ke mana harus menjual untuk mendapatkan harga yang bagus.

Sekali lagi, meskipun dominasi pertanian kakao yang komersial dan maskulin mampu menggusur ketergantungan keluarga petani dari pertanian padi sawah yang subsisten dan feminin, ada satu hal yang menarik yaitu bahwa sawah tetap bertahan dan ka-

kao lebih suka menembus hutan. Sawah, kakao, dan hutan akhirnya menjadi ajang artikulasi kuasa. Sawah menjadi representasi dari perlawanan perempuan terhadap dominasi pertanian kakao yang maskulin, sedangkan hutan menjadi bukti konkret dari pergulatan kuasa. Hutan menjanjikan ketersediaan air bagi sawah di kakinya, tapi pada saat yang sama hutan juga menjanjikan ruang untuk tegaknya pohon-pohon kakao.

Sawah dan Kakao: Proses Negosiasi dan Resistensi

Ibu Manta adalah perempuan Palopu asli yang dibesarkan dalam tradisi bertani padi yang diajarkan oleh neneknya kepada ibunya dan diteruskan kepadanya, lalu diturunkan oleh Ibu Manta kepada anak perempuannya. Ia menikahi seorang lelaki Jawa yang terdampar di Sulawesi Tengah karena nenek-kakeknya ikut program transmigrasi. Pak Manta bercerita bahwa tidak satu pun cara mencari uang secara halal luput ia coba. Mulai dari mencari rotan ke hutan, menjadi pedagang kelontong yang berkuda sampai ke pelosok, sampai akhirnya ia memutuskan untuk bertanam cokelat di akhir 1980-an.

Sebagai orang Jawa yang merantau ke Palopu, tentunya Pak Manta tidak memiliki tanah warisan barang sejangkal pun. Istrinyalah yang diwarisi beberapa petak sawah oleh keluarganya. Namun, dari hasil kerja serabutan dan ditambah pinjaman sedikit, Pak Manta mampu membeli sepetak tanah yang ditanaminya dengan kakao. Rumah mereka berlantai keramik, bertembok permanen, ruang tamunya diisi perabotan apik, termasuk televisi ukuran 29 inci, dan di halamannya sebuah motor terparkir. Menurut Pak Manta, semua itu adalah hasil berkebun cokelat.

Melihat kejayaan cokelat yang tidak juga surut, Pak Manta meminta istrinya untuk menjual saja sawahnya, supaya bisa membeli lagi tanah untuk kebun cokelat. Isterinya menolak. Ibu Manta berkeras bahwa sawah adalah jaminan hidup, untuk tidak terpaksa membeli beras. Bagi Ibu Manta, juga bagi kebanyakan orang Palopu, sawah adalah representasi kedaulatan pangan keluarga. Jika beras harus dibeli, bagaimana jika suatu saat mereka tidak punya uang? Mereka sama sekali tidak mau makan menjadi tergantung pada uang. Lagipula, Ibu Manta tidak pernah punya kekuasaan untuk mengatur keuangan keluarga. Setiap bulannya ia menerima jatah belanja dari Pak Manta. Kalau sampai terjadi

untuk beras pun harus minta uang lagi pada suaminya, Ibu Manta merasa akan kehilangan satu-satunya ranah yang memberinya kemandirian dan otoritas. Sebuah wilayah tanpa campur tangan suaminya, tempat ia leluasa memutuskan dan melakukan sendiri semua urusan produksi dan konsumsi berkaitan dengan sawah dan beras yang dihasilkannya. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk bertahan sampai badannya tidak kuat lagi dibawa bersawah.

Selama bertahun-tahun Ibu Manta bersawah, tidak pernah sekalipun ia meminta suaminya untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki Palopu di sawah. Ia memilih untuk *berbaku balas tangan* dengan saudara-saudaranya yang lelaki. Selama itu pula, tidak pernah satu hari pun ia pernah meluangkan waktu untuk bahkan sekadar melihat-lihat kebun cokelat suaminya. Ketika usianya menua dan bekerja di sawah hampir tidak mungkin, suaminya mulai mendesaknya lagi untuk menjual sawah. Menurut Pak Manta, sawah Ibu Manta sudah mulai makan biaya, karena sekarang harus membayar orang untuk mengerjakan sawahnya dan uang untuk membayar tenaga kerja itu menjadi tanggungannya sebagai suami. Menyadari keterbatasannya, Ibu Manta tidak mampu

menolak secara terbuka. Namun, ia tetap menyatakan penolakan dengan halus, yaitu dengan cara menyerahkan sawahnya kepada anak perempuannya. Bagaimanapun, anaknya akan tetap memerlukan keputusan Ibu Manta dalam urusan produksi dan konsumsi menyangkut sawah mereka. Dengan cara ini Ibu Manta masih mampu meneguhkan otoritasnya dalam keluarga.

Apakah keberadaan setiap sawah di Palopu menyimpan cerita pergulatan kuasa yang sama? Saya yakin tidak. Akan tetapi, di balik kesepakatan sebagian besar orang Palopu untuk mempertahankan sawah demi kedaulatan pangan keluarga, di sanalah terletak ruang yang masih memberikan otoritas dan otonomi utuh kepada perempuan di wilayah produksi dan konsumsi. Di ruang ini perempuan masih bisa menuliskan dan mewujudkan agenda-agendanya. Dengan memiliki beras mereka bisa mempertahankan posisi sosialnya, yaitu: mengirim beras ketika tetangga mengadakan pesta atau menghadapi kematian anggota keluarga; mengirim beras kepada tetangga yang membutuhkan dan akan dikirim beras ketika sedang membutuhkan; dan menukar beras dengan ikan, garam, atau gula ketika uang tidak di tangan. Beras masih menjadi alat tukar, juga alat untuk

mengekspresikan resiprositas. Posisi beras ini belum bisa digantikan sepenuhnya oleh uang.

Namun, pada saat kepemilikan sawah hilang—sehingga semua pengeluaran rumah tangga digantungkan pada uang yang dihasilkan dari cokelat, sementara sebagian besar keputusan produksi cokelat merupakan otoritas laki-laki—maka bersama dengan itu pula meluruhlah ruang-ruang otoritas perempuan. Seperti kata Wolf di sebuah artikel yang dimuat dalam buku yang disunting oleh Visvanathan (1997), karena tidak banyak rumah tangga yang menjalankan demokrasi dalam proses pengambilan keputusannya, maka strategi rumah tangga tidak mungkin terlepas dari relasi kuasa yang bersifat mendominasi dan mensubordinasi. Oleh sebab itu, ketika perempuan mampu berstrategi untuk mempertahankan ruang-ruang otoritasnya, inilah yang disebut Villareal dalam Long & Long (1992) sebagai sebuah 'manuver': *kemampuan berkelit di tengah himpitan*. Bahkan Ibu Mini membawa manuvernya menjadi sebuah pergulatan wacana tentang kedaulatan adat.

Hutan sebagai Wilayah Manuver

Masih di bukit dan lembah yang sama, bertetangga dengan desa Palopu adalah desa Tora. Menceritakan Desa Tora yang tidak biasa ini sungguh tidak mudah. Desa ini menjadi sangat terkenal karena mampu meyakinkan otoritas Taman Nasional Lore Lindu bahwa mereka memiliki aturan adat yang sama sahnya dengan hukum-hukum konservasi yang diberlakukan oleh negara di kawasan hutan. Melalui proses pendokumentasian dan penggalan bertahun-tahun serta pemakaian kembali aturan-aturan adatnya, Desa Tora membuktikan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mengelola sendiri hutan di wilayah adatnya. Dan klaim ini diterima oleh negara.

Di balik cerita hebat ini ada sosok perempuan bertubuh kecil. Dialah Ibu Mini. Ibu Mini sudah lama gelisah karena ia mendapatkan bahwa ibu-ibu PKK di kampungnya sering hanya bertugas di dapur ketika bapak-bapak sibuk rapat membicarakan pembangunan desa. Dari inisiatif kerasnya untuk terlibat dalam proses revitalisasi adat dan posisinya sebagai anak dari mantan kepala desa yang disegani, Ibu Mini belajar bahwa adat Tora justru memberikan porsi politis yang sangat besar bagi perempuan dalam so-

al pengambilan keputusan di komunitasnya. Peran perempuan bukan sekedar membuat kue dan mengantarkan kopi kepada bapak-bapak yang sibuk rapat. Kehadiran perempuan dalam musyawarah desa bahkan bisa menentukan keabsahan sebuah keputusan. Tanpa kehadiran *tina ngata* (sebutan bagi perempuan yang duduk sebagai ketua adat), sebuah keputusan akan diragukan keabsahan kulturalnya (Toheke dan Pelea 2005).

Perjuangan untuk mengklaim wilayah hutan adat komunitas Tora juga tidak terlepas dari desakan kesertaan perempuan sebagai pengambil keputusan. Ibu Mini mulai mengorganisasi perempuan-perempuan Tora dan mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi perempuan adat. Berlandaskan adat, organisasi ini membawa perempuan Tora meraih posisi yang setara dengan kelembagaan desa lainnya, seperti BPD dan LKMD, dan duduk bersama di rapat-rapat komunitas untuk menyuarakan pendapat dan kepentingan perempuan. Demikianlah Ibu Mini telah berhasil melakukan manuver dengan menggunakan adat dan momentum klaim wilayah hutan untuk mendorong perempuan tampil di ruang-ruang publik.

Tentu saja teks beberapa paragraf ini terpaksa banyak mereduksi proses yang mereka sebut sebagai maraton panjang. Namun, pengakuan wilayah adat dan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat Tora bukanlah monumen dan prasasti, tetapi pergulatan kuasa yang harus berulang-ulang dibuktikan dan dilahirkan kembali. Hutan, bagi Ibu Mini, adalah wilayah manuver politik. Apa jadinya jika posisi politik yang sudah direbut tersebut tidak bisa mengartikulasikan agenda sehari-hari perempuan Tora?

Hutan, bagi perempuan Tora yang setiap hari berlumur lumpur sawah, adalah mata air yang menghidupi padi-padiannya. Jika ada suara *chainsaw* (mesin gergaji) menggemuruh di hutan, yang terbayang adalah ancaman longsor dan banjir yang melanda sawah-sawah mereka. Di mana peran organisasi perempuan adat untuk menghentikan suara gergaji di tengah hutan itu?

Di tengah gegap gempita keberhasilan Ibu Mini membawa perempuan Tora kembali berkibrah di ruang publik, ada hal yang terlupakan. Bahwa tidak ada pembatas nyata antara ruang domestik dan publik. Proses pengambilan keputusan adalah pergulatan kuasa di semua aras. Ketika perempuan bisa merebut ruang otonomi di wila-

yah publik, selainya ruang ini adalah cermin dari keluasan otonominya di rumah. Ketika masih harus berjuang mempertahankan sawah sebagai artikulasi ruang otonomi dan wilayah otoritasnya, perempuan Palopu dan Tora kehilangan hutan karena cokelat dan penebangan kayu tanpa bisa berbuat apa-apa. Hal ini sama artinya dengan menyerahkan kuasa pada pasar, uang, dan formalitas. Banyak perempuan Palopu dan Tora memang tidak keberatan tentang hal ini. Namun, banyak pula perempuan seperti Ibu Manta dan Mini yang terus memperjuangkan ruang-ruang otoritasnya di tengah himpitan pasar, uang, dan formalitas.

Kesimpulan

Bagi Jackson (2003), sepanjang ketidakterlibatan perempuan dalam pro-

ses pengambilan keputusan tentang sumber daya tidak menjauhkannya dari akses terhadap sumber daya keluarga, di situlah perempuan mendapatkan ketahanan sosial ekonomi (*social economic security*). Menurut saya, ketahanan sosial ekonomi perempuan tidak semata beralas pada basis material, tetapi juga pada basis kemanusiaannya, yaitu adanya pengakuan bahwa perempuan adalah manusia yang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan otonomi dan mengartikulasikan otoritasnya di ranah-ranah yang dikuasainya. Jika pasar yang dikonstruksi secara sosial dan politik tidak mampu memberikan itu, maka konstruksi sosial politik baru perlu dibangun untuk memberi makna baru bagi pasar.



DAFTAR PUSTAKA

Agarwal, B. 1994. *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.

_____. 2003. "Women's Land Rights and the Trap of Neo-Conservatism: A Response to Jackson". *Journal of Agrarian Change* 3(4) October. pp571—585. London: Blackwell Publishing Ltd.

- Foucault, M. 2002. *Power/Knowledge, Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Iversen, V. C. Jackson, B. Kebede, A. Munro, A and a. Verschoor. *What's love got to do with it? An Experimental Test of Household Models in East Uganda*. CSAE Working Paper Series/2006-01.
- Jackson, C. 2003. "Gender Analysis of Land: Beyond Land Rights for Women?". *Journal of Agrarian Change* 3(4) October. pp453—480. London: Blackwell Publishing Ltd.
- Jewitt, S. 2000. "Unequal Knowledges in Jharkand, India: De-Romanticizing Women's Agroecological Expertise". *Journal of Development and Change* Vol.13. pp961—985. Oxford: Institute of Social Studies, Blackwell Publisher.
- Long, N. dan Anna Long. 1992. *Battlefields of Knowledge: The Interlocking of Theory and Practice in Social Research and Development*. London: Routledge.
- Razavi, S. 2007. "Liberalization and Women's Access to Land". *Third World Quarterly* 8(28). Routledge Taylor & Francis Group.
- Sen, A. 1990. "Gender and Cooperative Conflicts", dalam I. Tinker (ed.). *Persistent Inequalities: Women and World Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Toheke, R.P. dan Krispus Pelea. 2005. *Perempuan dan Konservasi: Revitalisasi Kultural Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Komunitas Toro Sulawesi Tengah*. Palu: OPANT, CARE, PTF ECML II Central Sulawesi.
- Wolf, D.L. 1997. "Daughters, Decision, and Dominations: An Empirical and Conceptual Critique of Household Strategies", dalam N. Visvanathan, L. Duggan, L. Nisonoff, dan N. Wiegiersma (eds.). *The Women, Gender & Development Reader*. London dan New Jersey: Zed Books Ltd.